

# **TINJAUAN ATAS PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**

**Oleh:**

**Laduni Zahra**

## **ABSTRAK**

Prosedur adalah serangkaian langkah atau tindakan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya digunakan untuk menjalankan suatu tugas dan aktivitas secara efisien dan konsisten. Adanya prosedur yang dilakukan tentunya untuk membantu agar perjalanan dinas dilingkungan Direktorat agar menjadi efisien dan konsisten untuk dilakukan karena merupakan bagian dari program kerja Direktorat . Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menjelaskan bagaimana ketentuan terkait Peraturan Pemerintah Keuangan (PMK) dan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berkaitan dengan perjalanan dinas pada ruang lingkup Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Di samping dengan tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan juga dokumentasi agar laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Tidak hanya itu juga, menggunakan tahapan reduksi data lalu penyajian data hingga penentuan kesimpulan menjadi bagian terpenting yang penulis gunakan pada laporan ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh Direktorat tentunya juga sudah menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 yang telah direvisi untuk beberapa isinya dan menjadi peraturan terbaru yaitu PMK Nomor 119 Tahun 2023 yang dijadikan pedoman untuk tahun anggaran 2024.

***Keyword: Prosedur, Perjalanan Dinas, dan Peraturan Menteri Keuangan***

**REVIEW OF OFFICIAL TRAVEL PROCEDURES IN THE  
DIRECTORATE OF INSTITUTIONALIZATION AND  
PREVENTION OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES OF  
THE MINISTRY OF MANPOWER RI**

**By:  
Laduni Zahra**

**ABSTRACT**

*A procedure is a structured series of steps or actions designed to achieve a specific goal. It is usually used to carry out a task and activity efficiently and consistently. The existence of procedures carried out is certainly to help official travel within the Directorate to be efficient and consistent to do because it is part of the Directorate's work program. The purpose of this Final Project Report is to explain how the provisions related to Government Financial Regulations (PMK) and Input Cost Standards (SBM) relating to official travel within the scope of the Directorate of Institutionalization and Prevention of Industrial Relations Disputes. In addition to these objectives, the author uses data collection techniques through observation and documentation so that this final project report can be completed. Not only that, using the data reduction stage and then presenting the data to determine the conclusion is the most important part that the author uses in this report. So that it can be concluded that official travel carried out by the Directorate has certainly also used Minister of Finance Regulation Number 113 / PMK.05 / 2012 which has been revised for some of its contents and has become the latest regulation, namely PMK Number 119 of 2023 which is used as a guideline for the 2024 fiscal year.*

**Keywords: Procedures, Official Travel, and Minister of Finance Regulations**